

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENGENAI KARTU TANI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

NAMA : M.Fadel.Purnama.Aji
NPM : E. 1735223017
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SEBELAS
APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian:

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020
MENGENAI KARTU TANI DI DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun Oleh:

NAMA : M.Fadel.Purnama.Aji
NPM : E1735223017
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Suherman, Drs., M.Si.
NIDN. 0416036702



Edi Setiawan, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0406067505

Mengetahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang.



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.
NIDN: 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : M. Fadel Purnama Aji
NOMOR POKOK : E. 1735223017
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai
Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Sumedang

Telah Mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Sabtu
Tanggal : 17 Juli 2021
Pukul : 08.00 s.d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si

(.....)

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si

(.....)

Pembimbing I : Suherman, Drs., M.Si.

Pembimbing II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si.

(.....)

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Judul Skripsi:

**Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020
Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumedang**

Telah dilakukan perbaikan sesuai saran dan koreksi Dosen Penguji
pada Ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi:

Penguji I : Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd.



Penguji II : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si.

(.....)

Penguji III : Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si.

(.....)

A handwritten signature in black ink, located to the right of the second and third reviewer names, overlapping the signature lines.

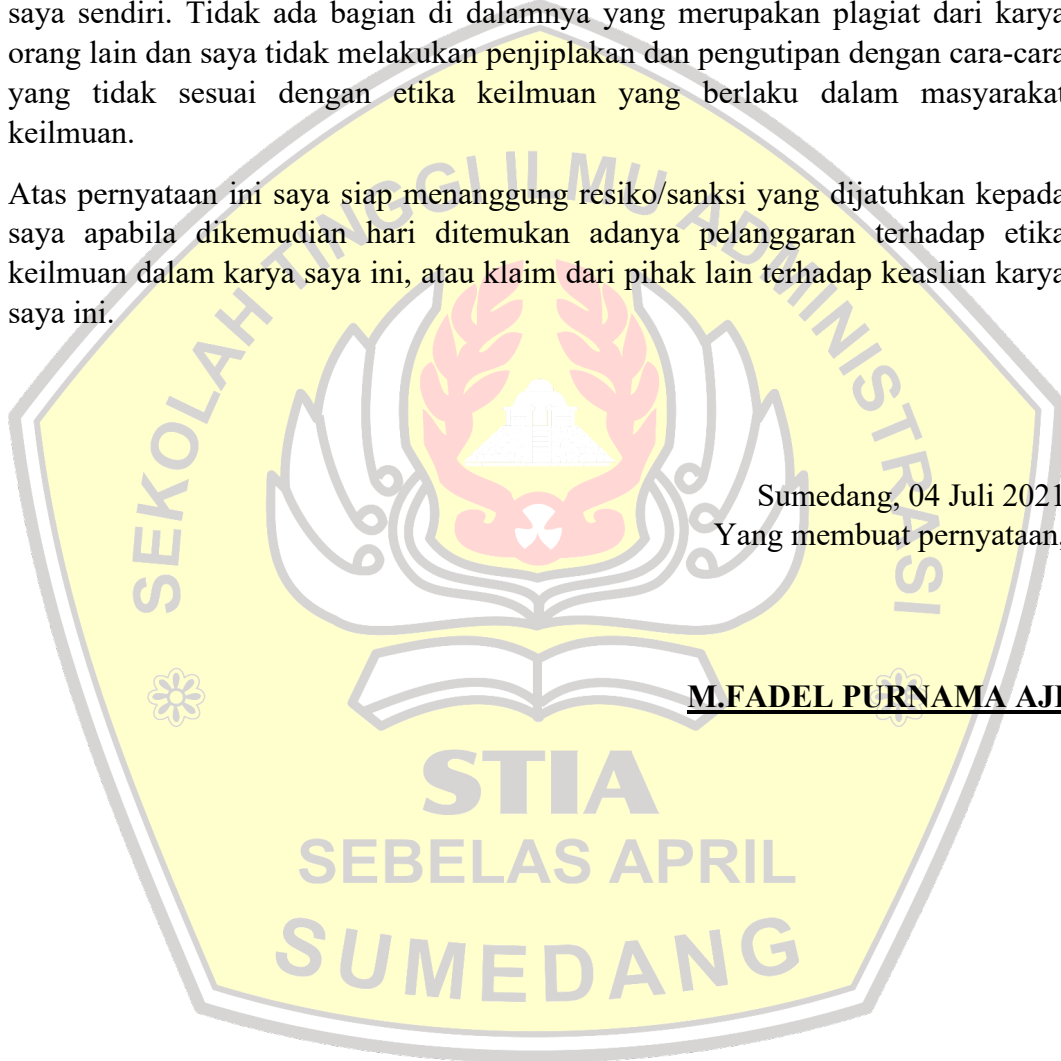
PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang**” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, 04 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

M.FADEL PURNAMA AJI



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SEBELAS APRIL
SUMEDANG**

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh:

NAMA : M.Fadel.Purnama.Aji
NPM : E1735223017
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

219 halaman, 5 bab, 76 tabel, 10 gambar, 7 lampiran
Daftar pustaka 31 Buku dan 5 dokumen.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah yang berprofesi sebagai petani di setiap Kecamatan dan Kabupaten tujuan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi Teknik penentuan informan penelitian, yaitu *purposive sampling*. Dengan jumlah informan penelitian sebanyak 4 orang Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Seksi Alat mesin, Pupuk dan Pestisida, Penyuluh Kabupaten, Penyuluh Kecamatan (Unit Pelaksana Teknis Daerah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani belum terkelola dengan baik sehingga kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani belum merata dengan optimal, karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya potensi sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat dan sosialisasi yang belum baik, maka perlu upaya dengan meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat.

Saran yang dapat diberikan yaitu agar meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi, dan sosialisasi secara rutin serta metode sosialisasi harus lebih variatif.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Tani

**HIGH SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (STIA) ELECTION
APRIL SUMEDANG**

ABSTRACT

Arranged by:

NAME : M.Fadel Purnama Aji
MAIN NUMBER : E1735223017
STUDY PROGRAM: STATE ADMINISTRATION SCIENCE

219 pages, 5 chapters, 76 tables, 10 pictures, 7 attachments
Bibliography 31 Books and 5 documents.

Improving the welfare of the lower middle class who work as farmers in each sub-district and district research objectives to know How to implement the policy of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 01 of 2020 concerning the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer in the Agricultural Sector in Fiscal Year 2020 concerning Farmer Cards in the Department of Agriculture and Food Security Sumedang.

The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews, observations, library studies and documentation Techniques for determining research informants, namely purposive sampling. With the number of research informants as many as 4 Secretary of the Department of Agriculture and Food Security, Head of The Section of Machine tools, Fertilizer and Pesticides, District Extension, District Extension (Regional Technical Implementation Unit).

The results showed that the implementation of the allocation policy and the highest retail price of subsidized fertilizer on farm cards have not been managed properly so that the allocation policy and the highest retail price of subsidized fertilizer on farm cards have not been evenly distributed optimally, because there are some that must be improved such as lack of human resource potential, and lack of communication with the community and socialization that has not been good , it is necessary to make efforts by improving the quality of human resources, financial resources, and improving communication patterns with the community.

The advice that can be given is to improve the quality of human resources capabilities, improve coordination, and socialization on a regular basis and socialization methods should be more varied.

Keywords: Implementation, Policy, Farm Card

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Proposal Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang”. Dalam penulisan skripsi Penelitian penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki kualitas penulis dimasa yang akan datang.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan laporan Proposal Penelitian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H.Yuyun Hidayat, Drs. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si.Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Suherman,Drs.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Proposal Penelitian ini.
7. Yth. Bapak Edi Setiawan, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Proposal Penelitian ini

8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Yth. Bapak Ir. H. Amim, MM sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
10. Yth. Seluruh Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang telah bersedia diwawancara.
11. Yth. Seluruh Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
12. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.
13. Rekan-rekan mahasiswa STIA Sebelas April Sumedang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Sumedang, Februari 2021

M.Fadel Purnama Aji

NPM. E. 1735223017

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Administrasi Negara	12
1. Pengertian Administrasi Negara	12
a. Ciri-ciri Administrasi Negara	13
2. Ruang Lingkup Administrasi Negara	14
3. Kaitan Administrasi dengan Variabel Penelitian	16
B. Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Kebijakan Publik	18
a. Ruang Lingkup Kebijakan Publik	19
b. Ciri-ciri Kebijakan Publik	19
c. Tujuan Kebijakan	20

d. Penyusunan Agenda Kebijakan	21
e. Formulasi Kebijakan Publik	21
f. Perumusan Masalah Kebijakan Publik	23
g. Evaluasi Kebijakan.....	24
C. Implementasi Kebijakan.....	25
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	25
a. Model Implementasi Kebijakan	26
b. Tahapan Implementasi Kebijakan	30
c. Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	34
d. Alokasi dan Harga Eceran Tertingg (HET) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani.....	36
e. Tujuan dan Maksud Program Kartu Tani	38
f. Syarat Program Untuk Membuat Kartu Tani	38
g. Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Kartu Tani	39
D. Kajian PenelitianTerdahulu.....	40
E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	44
1. Kerangka Pemikiran	44
2. Kisi-kisi Pertanyaan.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	51
B. Penentuan Sasaran, dan Informan Penelitian	54
1. Penentuan Sasaran	54
2. Informan Penelitian.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Prosedur Pengolahan dan Analisi Data	58
E. Lokasi Dan Jadwal Penelitian	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian	66
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	66
2. Visi dan Misi	67
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	68
a. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	68
b. Uraian tugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	69
4. Keadaan Pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	73
5. Keadaan Fasilitas Kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	77
6. Karakteristik Sasaran Penelitian.....	78
B. Implementasi Kebijakan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Mengenai Kartu Tani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	79
a. Ukuran dan tujuan kebijakan.....	79
1) Kemampuan Pelaksana Kebijakan	79
2) Kemampuan Masyarakat	84
b. Sumber Daya	90
1) Sarana Prasarana	90
2) Sumber Daya Manusia	95
3) Sumber Daya Finansial	100
c. Karakteristik Agen Pelaksana.....	105
1) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).....	105
2) Keseimbangan Cakupan Luas Wilayah Dengan Agen Pelaksana.....	111
d. Sikap/Kecenderungan Pelaksana	116
1) Respon Agen Pelaksana Dan Masyarakat	116

e. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana	123
1) Adanya Koordinasi.....	124
2) Adanya Monitoring Aktivitas Kegiatan	128
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik	133
1) Pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik.....	133
 C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	143
a. Kondisi Lingkungan	143
1) Adanya Komunikasi Pelaksana Dengan Masyarakat.....	143
2) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik	148
b. Hubungan Antar Organisasi	153
1) Kurangnya Koordinasi Antar Pihak Pelaksana Dengan Masyarakat.....	154
2) Kurangnya Intensitas Pemberian Informasi Kepada Masyarakat	158
3) Ketepatan Penyampaian Tujuan Kebijakan Kepada Masyarakat	164
c. Sumber Daya.....	168
1) Kurangnya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	169
2) Kurangnya Dukungan Sumber Daya Finansial	174
3) Kurangnya Sumber Daya Informasi	178
d. Karakteristik Instusi Implementor	183
1) Kurangnya Komunikasi Dengan Masyarakat	183
2) Kurangnya Pemahaman Implementor.....	188
 D. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	196

a. Kondisi Lingkungan	196
1) Memiliki Komunikasi Yang Baik Antar Pelaksana Dengan Masyarakat	196
2) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik Yang Kondusif.....	201
b. Hubungan Antar Organisasi	206
1) Terjadinya Koordinasi Pihak Yang Terlibat Dengan Masyarakat	207
2) Intensitas Informasi Kepada Masyarakat Terpenuhi.....	212
3) Ketepatan Penyampaian Tujuan Kebijakan Kepada Masyarakat.....	217
c. Sumber Daya.....	221
1) Memiliki Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.....	222
2) Memiliki Sumber Daya Finansial	227
d. Karakteristik Institusi Implementor	232
1) Memiliki Standar Operasional Prosedur	232
2) Memiliki Kejelasan Pada Struktur Birokrasi	236

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	245
1. Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	245
2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	246
3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	246
B. Saran	247

Daftar Pustaka.....	
----------------------------	--

DAFTAR TABEL

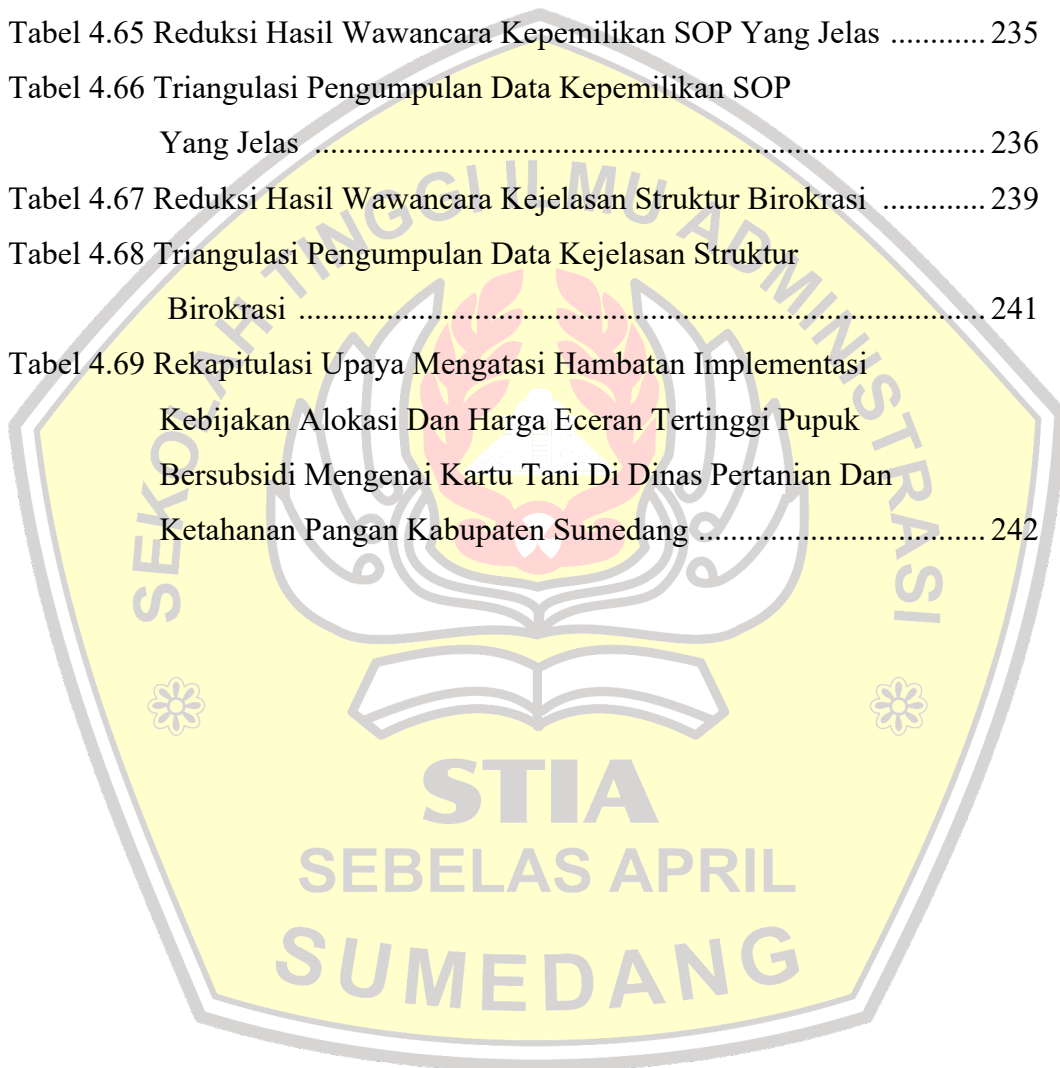
Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dalam Kartu Tani	3
Tabel 1.2 Jenis Pupuk Bersubsidi Dan HET	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	42
Tabel 2.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	47
Tabel 3.1 Informan Penelitian	56
Tabel 3.2 Deskripsi Informan	57
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	64
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Menurut Tingkat Pendidikan	73
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Menurut Golongan	74
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Menurut Jabatan	75
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Menurut Rentang Usia	76
Table 4.5 Jumlah Asset Atau Modal Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	77
Tabel 4.6 Rincian Sample Objek Penelitian	78
Tabel 4.7 Reduksi Hasil Wawancara Kemampuan Pelaksana Kebijakan	82
Tabel 4.8 Triangulasi Pengumpulan Data Kemampuan Pelaksana Kebijakan	83
Tabel 4.9 Reduksi Hasil Wawancara Kemampuan Masyarakat Kebijakan	88
Tabel 4.10 Triangulasi Pengumpulan Data Kemampuan Masyarakat Kebijakan	89
Tabel 4.11 Reduksi Hasil Wawancara Sarana Prasarana	93
Tabel 4.12 Triangulasi Pengumpulan Data Sarana Prasarana	94

Tabel 4.13 Reduksi Hasil Wawancara Sumber Daya Manusia	98
Tabel 4.14 Triangulasi Pengumpulan Data Sumber Daya Manusia	99
Tabel 4.15 Reduksi Hasil Wawancara Sumber Daya Finansial	103
Tabel 4.16 Triangulasi Pengumpulan Data Sumber Daya Finansial	104
Tabel 4.17 Reduksi Hasil Wawancara Adanya SOP	109
Tabel 4.18 Triangulasi Pengumpulan Data Adanya SOP	110
Tabel 4.19 Reduksi Hasil Wawancara Keseimbangan Cakupan Luas Wilayah Dengan Jumlah Agen Pelaksana	114
Tabel 4.20 Triangulasi Pengumpulan Data Keseimbangan Cakupan Luas Wilayah Dengan Jumlah Agen Pelaksana	115
Tabel 4.21 Reduksi Hasil Wawancara Respon Agen Pelaksana Dan Masyarakat	121
Tabel 4.22 Triangulasi Pengumpulan Data Respon Agen Pelaksana Dan Masyarakat	122
Tabel 4.23 Reduksi Hasil Wawancara Adanya Koordinasi	127
Tabel 4.24 Triangulasi Pengumpulan Data Adanya Koordinasi	128
Tabel 4.25 Reduksi Hasil Wawancara Adanya Monitoring Aktivitas Kegiatan	131
Tabel 4.26 Triangulasi Pengumpulan Data Adanya Monitoring Aktivitas Kegiatan	132
Tabel 4.27 Reduksi Hasil Wawancara Pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik	137
Tabel 4.28 Triangulasi Pengumpulan Data Pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik	139
Tabel 4.29 Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	141
Tabel 4.30 Reduksi Hasil Wawancara Adanya Komunikasi Pelaksana Dengan Masyarakat	146
Tabel 4.31 Triangulasi Pengumpulan Data Adanya Komunikasi Pelaksana Dengan Masyarakat	147

Tabel 4.32 Reduksi Hasil Wawancara Kondisi Lingkungan	152
Tabel 4.33 Triangulasi Pengumpulan Data Kondisi Lingkungan	153
Tabel 4.34 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Koordinasi Antar Pihak Pelaksana Dengan Masyarakat.....	157
Tabel 4.35 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Koordinasi Antar Pihak Pelaksana Dengan Masyarakat	158
Tabel 4.36 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Intensitas Pemberian Informasi Kepada Masyarakat	162
Tabel 4.37 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Intensitas Pemberian Informasi Kepada Masyarakat	163
Tabel 4.38 Reduksi Hasil Wawancara Ketepatan Dalam Penyampaian Tujuan Kebijakan Kepada Masyarakat	167
Tabel 4.39 Triangulasi Pengumpulan Data Ketepatan Dalam Penyampaian Tujuan Kebijakan Kepada Masyarakat	168
Tabel 4.40 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	172
Tabel 4.41 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Dukungan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	173
Tabel 4.42 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Dukungan Sumber Daya Finansial	177
Tabel 4.43 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Dukungan Sumber Daya Finansial	178
Tabel 4.44 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Sumber Daya Informasi	181
Tabel 4.45 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Sumber Daya Informasi	182
Tabel 4.46 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Komunikasi Dengan Masyarakat	186
Tabel 4.47 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Komunikasi Dengan Masyarakat	187

Tabel 4.48 Reduksi Hasil Wawancara Kurangnya Pemahaman	
Implementor	190
Tabel 4.49 Triangulasi Pengumpulan Data Kurangnya Pemahaman	
Implementor	191
Tabel 4.50 Rekapitulasi Faktor Hambatan Implementasi Kebijakan Alokasi	
Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Mengenai Kartu	
Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten	
Sumedang	193
Tabel 4.51 Reduksi Hasil Wawancara Memiliki Komunikasi Yang Baik	
Antar Pelaksana Dengan Masyarakat	199
Tabel 4.52 Triangulasi Pengumpulan Data Memiliki Komunikasi Yang Baik	
Antar Pelaksana Dengan Masyarakat	200
Tabel 4.53 Reduksi Hasil Wawancara Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial	
Dan Politik	204
Tabel 4.54 Triangulasi Pengumpulan Data Kondisi Lingkungan Ekonomi,	
Sosial Dan Politik	205
Tabel 4.55 Reduksi Hasil Wawancara Koodinasi Pihak Yang Terlibat	
Dengan Masyarakat	210
Tabel 4.56 Triangulasi Pengumpulan Data Koordinasi Pihak Yang Terlibat	
Dengan Masyarakat	211
Tabel 4.57 Reduksi Hasil Wawancara Upaya Agar Masyarakat	
Mendapatkan Intensitas Informasi	215
Tabel 4.58 Triangulasi Pengumpulan Data Upaya Agar Masyarakat	
Mendapatkan Intensitas Informasi	216
Tabel 4.59 Reduksi Hasil Wawancara Upaya Ketepatan Penyampaian	
Tujuan Kebijakan Kepada Masyarakat	220
Tabel 4.60 Triangulasi Pengumpulan Data Upaya Ketepatan Penyampaian	
Tujuan Kebijakan Kepada Masyarakat	221
Tabel 4.61 Reduksi Hasil Wawancara Upaya Untuk Memiliki Sumber Daya	
Manusia Yang Berkualitas	225

Tabel 4.62 Triangulasi Pengumpulan Data Upaya Untuk Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	226
Tabel 4.63 Reduksi Hasil Wawancara Upaya Sumber Daya Finansial Tercukupi	230
Tabel 4.64 Triangulasi Pengumpulan Data Upaya Sumber Daya Finansial Tercukupi	231
Tabel 4.65 Reduksi Hasil Wawancara Kepemilikan SOP Yang Jelas	235
Tabel 4.66 Triangulasi Pengumpulan Data Kepemilikan SOP Yang Jelas	236
Tabel 4.67 Reduksi Hasil Wawancara Kejelasan Struktur Birokrasi	239
Tabel 4.68 Triangulasi Pengumpulan Data Kejelasan Struktur Birokrasi	241
Tabel 4.69 Rekapitulasi Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	242



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Pengusulan Kartu Tani	2
Gambar 1.2 Flowchart Pembuatan Kartu Tani	6
Gambar 1.3 Penertbitan Kartu Tani	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 3.1 Desain Penelitian	54
Gambar 3.2 Triangulasi	59
Gambar 3.3 Komponen Dalam Analisis Data	60
Gambar 4.1 Map Lokasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	66
Gambar 4.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	67
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang
Nomor: 0032/SK/D-STIA/UN/K/I/2021 Tentang
Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi
Dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021
- Lampiran 5 : Surat Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Balasan Pemberian Izin Penelitian di Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
- Lampiran 7 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Riwayat Hidup Penulis
- Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

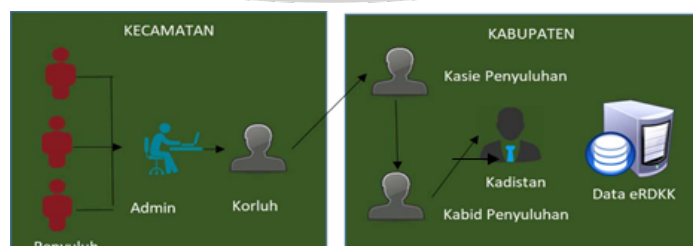
Dalam praktiknya, program kartu tani ini di mulai sejak 2017 hingga 2020 tercatat sudah sekitar 80.898 kartu yang berhasil didistribusikan kepada para petani di semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Namun dari puluhan ribu kartu tersebut kini belum bisa digunakan di karenakan terblokir. Kartu tani bisa terblokir karena sudah lama tidak digunakan dan ada kesalahan memasukan PIN saat mengoprasikan kartu tani tersebut. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 di dalamnya menerangkan tentang alokasi pupuk bersubsidi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Kartu Tani. Bertujuan ingin mensejahterakan rakyat dengan membuat suatu program kebijakan yaitu kartu tani, namun para petani yang kurang melek akan teknologi tidak tahu karena kebanyakan petani tinggal di daerah pelosok dan susah mendapatkan jangkauan signal provider sehingga susah untuk mencari informasi tentang program ini, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dituntut untuk mendata para petani dan menverifikasinya, sedangkan para petani membutuhkan informasi tentang program tersebut, maka dari itu PPL diharuskan untuk memberikan informasi yang intens, supaya para petani mengerti dan paham.

Banyak petani yang mengeluh dikarenakan ketidakseimbangan harga pupuk. Kegiatan pertanian didominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan

untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Kini pemerintah sedang gencar-gencarnya dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi untuk mensejahterakan rakyatnya khususnya yang berprofesi sebagai petani, pupuk bersubsidi ini dilaksanakan bersamaan dengan program kartu tani karena saling berkaitan, yang dimana kartu tani ini digunakan untuk transaksi pennebusan pupuk bersubsidi, kartu tani ini sebagai inovasi baru dari pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, kartu tani ini dilengkapi dengan teknologi yang mutakhir, kegunaan kartu tani ini selain untuk transaksi pennebusan pupuk bersubsidi akan tetapi bisa digunakan untuk menabung dan melihat hasil penjualan panen para petani. Kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi pennebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* dipengecer resmi.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penyediaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (revisi) terdapat syarat-syarat untuk membuat kartu tani semua provinsi harus wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK dengan mekanisme secara berikut.

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyusunan RDKK dikelompok tani untuk semua sub *excel* sesuai dengan format e-RDKK, lalu diserahkan kepada admin e-RDKK.



Gambar 1.1 Pengusulan Kartu Tani

Sumber: psp.pertanian.go.id

2. Admin e-RDKK mengupload data *soft copy* RDKK tersebut dalam sistem e-RDKK Kementan
3. Kordinator penyuluh (KorLuh) memverifikasi dengan membandingkan data yang sudah di-*upload* dan data *hard copy* RDKK yang sudah disepakati dan disetujui oleh penyuluh
4. Data yang sudah diverifikasi oleh Korluh akan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyuluhan ditingkat kabupaten secara berjenjang
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara *electronic* dalam sistem e-RDKK Kementan

Tabel 1.1
Alokasi dalam Kartu Tani

No	Uraian	Metode
1.	Pengisian awal	Pengisian awal alokasi pupuk dalam Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas. Bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan dalam RDKK.
2.	Perubahan	
	2.1 Pendaftaran petani baru	Setiap kali ada pendaftaran petani baru, pengisian alokasi pupuk dalam Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar per jenis komoditas. Bila belum ada dosis standar yang ditetapkan maka sesuai dengan usulan dalam RDKK.
	2.2 Pindah, Meninggal, Tidak Bertani Lagi	Setiap kali ada petani pindah, meninggal atau tidak bertani lagi, alokasi pupuk dalam Kartu Tani akan ditarik.
3.	Realokasi pupuk bersubsidi	Bila ada realokasi pupuk bersubsidi, tidak merubah alokasi dalam Kartu Tani tetapi yang berubah adalah Surat Keputusan Kepala Dinas yang menetapkan besaran plafon alokasi wilayah.

Sumber: psp.pertanian.go.id

Dari mekanisme diatas, pengendalian terhadap penggunaan anggaran adalah dengan penetapan alokasi baik melalui Peraturan Menteri Pertanian maupun Surat Keputusan Dinas, sehingga produsen/distributor/kios menjadikan permentan/ SK Kepala Dinas sebagai pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi. Tujuan dari kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi, kartu tani juga bertujuan untuk petani yang dapat digunakan untuk menabung memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan pada pendistribusian pupuk menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani khususnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Hal tersebut antara lain ditunjukan dengan seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, terlambatnya distribusi pupuk bersubsidi, dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dampaknya adalah harga pupuk di tingkat pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, dan mengakibatkan pemupukan tidak berjalan optimal. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.10 Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jenis Pupuk bersubsidi dan HET

JENIS PUPUK	HARGA		
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)	
UREA	1.800	90.000	(@50 Kg)
SP36	2.000	100.000	(@50 Kg)
ZA	1.400	70.000	(@50 Kg)
NPK	2.300	115.000	(@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000	(@40 Kg)
NPK FORMULA KHUSUS	3.000	150.000	(@50 Kg)

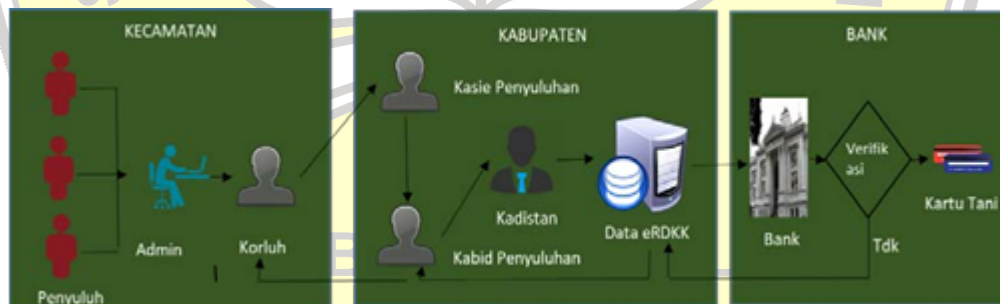
Sumber: *psp.pertanian.go.id*

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (Pengecer Resmi) secara tunai dalam kemasan 50 Kg untuk pupuk Urea, SP36, ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 Kg untuk pupuk organik.

Didalam mengatasi kelangkaan pupuk untuk masyarakat yang mengalami masalah pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden Nomor.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi) Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus mendaftarkan terlebih dahulu dan harus memiliki kelompok tani mendaftar kartu tani bisa dengan cara online, dan untuk transaksi penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 .



Gambar 1.2
Flowchart Pembuatan Kartu Tani
Sumber: Kabartani.com



Gambar 1.3 Penertbitan Kartu Tani
Sumber: psp.pertanian.go.id

1. Data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kasditan, akan diambil secara elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apa bila datanya sesuai dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan kartu tani.
2. Data yang dikembangkan oleh Bank, akan diteruskan kepada koordinator penyuluh

3. Koordinator penyuluh akan memerintahkan penyuluh untuk memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang

Penyuluh akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang. Setelah lengkap, penyuluh akan menyerahkan kembali data kepada admin kecamatan untuk diupload sebagaimana proses awal. Kelengkapan yang harus diserahkan ke Bank yaitu sebagai berikut. :

1. Dokumen yang diperlukan: fotocopy e-KTP dan KK
2. Petani hadir di Bank Mandiri/tempat yang telah ditentukan
3. Menunjukkan e-KTP asli dan menyebut nama ibu kandung
4. Petugas melakukan pengecekan server Bank Mandiri
5. Proses pembuatan Tabungan
6. Penyerahan tabungan Mandiri dan Kartu Tani oleh pegawai Bank Mandiri

Hasil observasi sementara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi yang mengarah kepada implementasi kebijakan yang belum optimal, dengan gejala-gejala antara lain:

1. Belum adanya kesiapan pada kios pupuk yang akan melayani kartu tani terkait dengan perangkat yang akan digunakan, mengingat kartu tani cara menggunakannya dengan digesek seperti ATM untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga parapetani mengalami kesulitan dalam pembelian pupuk bersubsidi. Maka dari itu sarana prasarana sangat diperlukan untuk berjalanya pelaksanaan program kartu tani
2. Adanya ketidakpahaman para petani dalam menggunakan kartu tani karena para petani kurang informasi dalam tatacara penggunaan kartu tani dari petugas penyuluh lapangan. Informasi tersebut merupakan informasi penting untuk

masyarakat/parapetani. Maka dari itu petugas penyuluh lapangan harus pandai dalam memberikan informasi kepada parapetani.

3. Keterbatasan sumber daya untuk mendukung berjalannya pelaksanaan kartu tani. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dukungan untuk sumber daya manusia yang berkompeten. Maka dari itu sumber daya manusia yang berkompeten akan berpengaruh dalam berjalannya pelaksanaan program kartu tani
4. Kurangnya sosialisasi tentang tujuan program kartu tani oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) kepada para petani, dan kebanyakan para petani kurang melek teknologi informasi. Dapat dilihat dari banyaknya kartu yang terblokir, maka dari itu petugas penyuluh lapangan dalam mensosialisasikan program kartu tani harus paham terlebih dahulu tentang program tersebut.

Dengan adanya latar belakang penelitian dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas dari hasil observasi awal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENGENAI KARTU TANI DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG”**

B. Fokus Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan fokus permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang?
3. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran yang positif dan dapat membangun bagi pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi pada program kartu tani. Serta menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan ataupun aparaturnya yang berwenang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan serta menambah dan memperluas wawasan bagi penulis. Serta menjadi sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Pengertian Administrasi Negara menurut Henry (Iriawan,2017:225) mengemukakan bahwa :

“Public Administration is a board-ranging and amorphous combination of theory and practiceis purpose is to promote a superior understanding of government and it’s relationship with society, it govern, as well to encourage public policies more responsive to social needs and institute managerial practise attuned to effectiveness, efficiency and the deeper human rewuistes of the citizenry” (Administrasi Publik atau Administrasi Negara merupakan kombinasi yang sangat beragam serta berpola antara teori dan pelaksanaan). Administrasi negara yang dimaksudka untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

Menurut Willoughby (Irawan ,2017:225) mengemukakan bahwa:

“Admnistrasi publik atau Administrasi Negara adalah fungsi untuk menjalankan hukum dengan sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislative dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah.”

Menurut White (Irawan,2017:225) mengemukakan bahwa “Administrasi publik atau administrasi negara terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksana atau pemaksaan kebijakan negara”

Pengertian menurut White dan Willoughby (Irawan,2017:226) memaknai administrasi publik sebagai pelaksana atau implementasi kebijakan hasil dari proses keputusan politik (lembaga legislatif).

Dwight Waldo (Irawan,2017:223) mengemukakan 2 jenis definisi:

1. *Public Administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah
2. *Public Administration* suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu proses kegiatan kerja sama lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan yang dapat memberikan pelayanank sekelompok masyarakat atau publik. Untuk memberikan suatu kemudahan dan melayani keperluan masyarakat atau publik. Administrasi yaitu suatu proses pengorganisasian untuk bekerja sama secara formal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi negara juga adalah proses kerja sama antara pelaku pemerintahan dalam melaksanakan suatu kegiatan kenegaraan dalam mencapai tujuan tidak hanya itu administrasi juga mempunyai peranan penting dalam merumuskan suatu kebijakan negara.

a. Ciri-ciri Administrasi Negara

Berikut ini diuraikan ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara terutama bila dibandingkan dengan swasta.

Menurut Thoha (2002:47-48) ciri-ciri perbedaan tersebut adalah:

- a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara bersifat urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, maka tidak akan ada jalan.
- b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
- c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi Negara dan administrator nya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legislatif dari administrasi Negara tersebut.

- d. Administrasi Negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi Negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
- e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi Negara sangat tergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Selanjutnya Thoha (2002:48-49) mengemukakan perbedaan administrasi negara dengan institusi-institusi yang lain, yaitu:

- a. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari.
- b. Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan.
- c. Administrasi Negara mempunyai ukuran tidak terbatas.
- d. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.
- e. Pelaksanaan administrasi Negara adalah sangat sulit diukur.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi negara sangat erat berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terlepas pada pengaruh politik. Karena hal tersebut kegiatan yang berhubungan dengan administrasi Negara sulit untuk dihindari.

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Ruang lingkup administrasi negara sangat luas yaitu mencakup bagian-bagian yang terkait dengan administrasi tersebut. Ruang lingkup ini untuk memudahkan kita dalam membahas administrasi negara, selain itu ruang lingkup ini menjadi batas luas administrasi tersebut. Berikut beberapa konsep teori yang termasuk kedalam ruang lingkup administrasi negara.

Menurut Chandler dan Plano (Irawan, 2017:239) mengatakan bahwa kehidupan manusia semakin kompleks, maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

Menurut Keban (Irawan,2017:239) mengatakan bahwa cakupan yang dinamis ini dapat di pelajari dari berbagai literature, khususnya buku-buku teks administrasi publik.Selain itu Keban menjelaskan bahwa salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi publik disuatu negara dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementrian) dan nondepartemen yang ada dalam suatu negara atau daerah.

Menurut Henri (1988:19) memuat yang menjadi ruang lingkup administrasi publik dengan topik atau konsep diantaranya:

- a. Organisasi Publik : Mencakup materi bahasan model organisasi, dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen Publik : Mencakup materi bahasan sistem dan ilmu manajemen, ecaluasi program dan produktivitas, anggran publik, manajemen sumber daya manusia (MSDM).
- c. Implementasi : Mencakup materi bahasan pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan administrasi negara sebagai sistem yang prakteknya dalam penyelenggaraan negara. Hakekat administrasi negara sebagai disiplin dan sistem yang dipraktekan di manca negara dengan berbagai sudut pandang yang melahirkan paragdigma tentang administrasi tersebut. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia identic dengan sistem penyelenggaraan kebijakan karena berkenaan dengan lembaga-lembaga bernegara dalam rangka mencapai tujuan negara. Ada beberapa unsur Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia diantaranya:

a) Unsur Nilai

Dapat diartikan sebagai tata nilai yang mendasari, memotivasi, memberi acuan dan merupakan tujuan. Meliputi landasan atau Dasar Negara.

b) Unsur Struktur

Merupakan tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan organisasi negara dan organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat.

c) Unsur Proses

Proses penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa adalah mewadahi, memfasilitasi, dan memadupadankan berbagai sistem politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan keamanan guna mewujudkan keserasian arah dan langkah kebijakan, supaya arah tujuan nasional tercapai dengan optimal.

3. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Proses pencapaian dari suatu tujuan didalam suatu organisasi pemerintahan ataupun organisasi masyarakat dapat dilihat dari seberapa efektifnya tujuan itu dilaksanakan. Hal ini didukung dengan beberapa komponen atau bagian yang dilakukan pada pelaksanaan program didalam organisasi, yaitu kegiatan yang dapat menjadi pemicu penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program yaitu pelaksanaan dalam pengimplementasian suatu kebijakannya, didalam sebuah proses pengimplementasian dapat dimulai dari adanya suatu kebijakan atau program dapat diformulasikan dalam sebuah misi untuk mencapai tujuan di suatu organisasi.

Menurut Chandler dan Plano (Mulyadi,2018:34) mengemukakan bahwa “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Menurut Henry dalam Pasolong (Mulyadi,2018:34) mendefinisikan Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam

hubungan masyarakat yang diperintah sdan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Menurut Pfiffner dan V Presthus (Mulyadi,2018:33) menyatakan bahwa administrasi adalah:

- a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
- c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari sejumlah para ahli diatas dapat dilihat adanya keterkaitan administrasi negara dengan implementasi kebijakan. Pendapat para ahli tersebut meripakan bukti nyata bahwa implementasi kebijakan menjadi peran yang sangat penting disetiap kajian ilmu administrasi negara karena ruang lingkup administrasi publik salah satunya kebijakan publik karena didalamnya terdapat ada sebuah cara-cara untuk mengimplentasikan suatu kebijakan publik dalam suatu pemecahan masalah di organisasi. Maka dari itu ilmu administrasi negara memerlukan sebuah dimensi yang dapat memberikan solusi terhadap kondisi tersebut. Dimensi ini dikenal dengan kebijakan publik dimana ditunjukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul pada tatanan pemerintah dan masyarakat, penetapan solusi, penerapan kebijakan (implementasi) dan evaluasi. Dalam ilmu administrasi negara dimensi kebijakan publik menjadi sarana untuk melayani kepentingan publik (umum) dan menetapkan strategi pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dan kebijakan public merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah oleh dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Menurut Woll sebagaimana (Taufiqurakhman,2014:04) Menyebutkan bahwa “Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Anderson sebagaimana (Taufiqurakhman,2014:04) mengungkapkan bahwa “Kebijakan adalah serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.”

Pressman dan Widavsky sebagaimana (Taufiqurakhman,2014:03) mendefinisikan “Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan.”

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah suatu kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dan dikembangkan oleh para pejabat pemerintahan.

a. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik menurut Iskandar (Yudiardi,2019:22) mengemukakan “Ruang lingkup kebijakan publik yaitu adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan masyarakat.”

Menurut Jones 1984 (Abdoelloh,2016:31)mengemukakan bahwa ruang lingkup kebijakan publik meliputi:

- a. Penyusunan agenda.
- b. Formulasi kebijakan.
- c. Adopsi kebijakan.
- d. Implementasi kebijakan dan evaluasi(penilaian)

Dapat dilihat dari penjelasan para ahli mengenai ruang lingkup kebijakan publik yaitu pada umumnya kebijakan mempunyai maksud dan tujuan daripada perilaku yang berubah atau acak. Kebijakan publik juga mempunyai bagian atau pola keputusan yang terpisah. Jadi kebijakan publik merupakan tugas pemerintah yang mengatu suatu pemerintahan.

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Solichin Wahab (1991:148) mengatakan bahwa ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Kebijakan yang bersangkutan paut dengan apa senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkret.
- d. Kebijakan pemerintah/publik mungkin berbentuk positif maupun negatif.

Dapat dilihat dari ciri-ciri kebijakan publik itu merupakan suatu tindakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah ataupun masyarakat.

c. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik menurut Hoogerweft (Anggara,2012:499) mengemukakan bahwa tujuan penting pada umumnya yaitu diantaranya:

- a. Memelihara ketertiban umum.
- b. Memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal.
- c. Memperpadukan berbagai aktifitas.
- d. Menunjukan dan membagi benda material dan nonmaterial.

Menurut Islamy (1997:17) mengemukakan konsep bahwa tujuan kebijakan memuat 3 elemen yaitu:

- a. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksana secara nyata taktik dan strategi.

Dari penjelasan tujuan kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu mempunyai tujuan yang sangat penting dan kebijakan pemerintah adalah kepentingan umum atau publik. Pembentukan sebuah kebijakan dapat dilakukan dengan cara demokrasi, dalam mengeluarkan suatu

kebijakan dapat memecahkan masalah yang terjadi ataupun bisa mencegah suatu masalah yang akan terjadi pada pelaksanaan atau penerapan kebijakan.

Dapat dilihat hal ini bahwa kebijakan publik bertujuan untuk memajukan perkembangan masyarakat dan memelihara ketertiban umum. Dalam prosesnya kebijakan publik melibatkan berbagai pihak dan berbagai faktor saling bekerjasama agar mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.

d. Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam penyusunan agenda kebijakan Menurut Subarsono (2009:11) mengemukakan ada beberapa bagian penyusunan diantaranya:

- a. Membangun persepsi dikalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena sebenarnya dianggap masalah.
- b. Membuat suatu batasan masalah.
- c. Memobilisasi dukungan agar masalah dapat masuk kedalam agenda pemerintah

e. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan menurut R.Dye (Yulianto,2015:26) mengemukakan bahwa: “Formulasi kebijakan merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif”.

Menurut Winarno (dalam Anggara,2014:183) mengemukakan bahwa formulasi kebijakan sebagai berikut:

“Formulasi kebijakan merupakan sebagai suatu proses yang dapat dipandang dengan dua macam kegiatan yaitu kegiatan pertama memutuskan secara umum hal-hal yang harus dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh

kesepakatan alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kegiatan yang kedua diarahkan pada keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini keputusan kebijakan mencakup tindak oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak alternatif yang telah dipilih”.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Agustino ,2016:97) mengatakan bahwa “*policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai, termasuk pembuatan keputusan.”

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah perumusan kebijakan. Sidney (dalam Agustino,2016:97) “formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan” yang ini artinya formulasi pada para analisis dan *descision makers* mengenai apa yang direncanakan.

Jones (Agustino 2016:100) bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang komprehensif ada beberapa hal yang harus di cermati diantaranya:

- a. Jumlah masalah yang ditangani. Apakah usulan kebijakan akan menyelesaikan/mengatasi masalah dalam lingkup masalah? Atau penelitiannya hanya ditunjukan pada kasus tertentu saja?
- b. Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah? Atau hanya melayani aspek-aspek tertentu?
- c. Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang diformulasi sudah diuji semua dampaknya? Ataukah pengujian dibatasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup itu tertentu saja?

Dalam sudut pandang lain menurut Islamy mengemukakan (dalam Agustino 2016:100) bahwa: “Perumusan usahakebijakan yang baik dan konprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analisis kebijakan dalam merumuskan kebijakan itu sendiri”. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat erumuskan kebijakan yang komprehensif diantaranya:

- a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif kebijakan.
- c. Menilai masing-masing dari alternatif yang tersedia.
- d. Merumuskan dan memutuskan alternatif kebijakan yang *visible* untuk dilaksanakan.

Dari beberapa para ahli diatas yang telah menjelaskan pengertiannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa formulasi kebijakan dapat menjadi kriteria yang menyarankan serta komprehensif dalam pengambilan keputusan.

f. Perumusan Masalah Kebijakan Publik

Saat permasalahan belum dirumuskan, terlebih dahulu merumuskan masalah kebijakan agar sesuai dengan tuntutan lingkungan dan masyarakat. Menurut Patton dan Sawicki (dalam Nawawi, 2009:122) mengemukakan ada beberapa bagian agar pembuatan kebijakan dapat merumuskan masalah sesuai dengan tepat dan benar diantaranya:

- a. Pikirkan mengapa suatu gejala sebagai masalah.
- b. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan.
- c. Kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang telah ditetapkan.
- d. Rumusan dan tujuan sasaran yang hendak dicapai.
- e. Identifikasi *policy envelope* berlabel yang mempengaruhi masalah.
- f. Tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi.
- g. Rumuskan masalah kebijakan dengan baik.

Setelah perumusan (formulasi) kebijakan. Perumusan (formulasi) kebijakan merupakan proses kelanjutan dari perumusan masalah yang telah dimasukan dalam agenda kebijakan, yang bertujuan mengembangkan rencana, metode dan konsep-konsep sebagai upaya memecahkan masalah publik. Perumusan kebijakan menghasilkan peraturan yang diusulkan oleh eksekutif atau aturan yang bersifat administratif. Pembuat kebijakan dapat memutuskan atau tidak memutuskan

beberapa permasalahan atau membiarkan masyarakat mampu menyelesaikan sendiri. Menurut Jones (dalam Nawawi, 2009:124) perlu dicermati perumusan masalah kebijakan yaitu :

- a. Jumlah masalah yang ditangani, apakah usulan kebijakan mempunyai seluruh masalah dalam lingkup masalah atau perhatian hanya pada contoh semata.
- b. Lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah atau hanya melayani aspek tertentu saja.
- c. Memikirkan dampak apakah usulan kebijakan diformulasikan sudah diuji semua dampaknya, atau pengujian dibatasi hanya pada dampak langsung dalam lingkup itu saja.

g. Evaluasi Kebijakan

Pada umumnya kita menganggap evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Sebenarnya tidak hanya itu. Evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (Agustino, 2016:163) yaitu evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasarkan kriteria dan standar yang dibuat.

Sedangkan menurut Jones (Agustino, 2016:165) evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk mencakup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasarkan kriteria atau standar yang dibuat.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut, karena tidak dilaksanakan. Implementasi adalah tindakan yang telah dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Menurut Grindle (Haedar,1980:7) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Wibawa,1994:15) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.”

Menurut Gordon (Pasolong,2008:58) “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”.

Dari definisi diatas implementasi diatas penulis berpendapat suatu tindakan yang berkenaan dengan pemerintahan atau swasta baik secara perorangan ataupun kelompok yang diarahkan para realisasi suatu program. Dari definisi para ahli diatas biasa diketahui bahwa implementasi menyangkut 3 hal diantaranya adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan dalam pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapainya tujuan yang ingin diraih, perlu dicatat bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur suatu kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan.

a. Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ke III, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan *top-down*. Model ini merupakan suatu kritikan terhadap model pendekatan *top-down* terkait dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi.

beberapa model-model implementasi kebijakan. Menurut Agustini (dalam Leo Agustino, 2016:133) antara lain sebagai berikut:

a. Model Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016:133)

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan istilah *model of the policy implementation*. Proses implementasi merupakan abstrasi atau *performance* dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi publik yang tinggi, berlangsung suatu hubungan dengan variabel. Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel menurut Meter dan Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik diantaranya:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilan jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosiokultur ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga maka akan sulit meralisasikanya.
- 2) Sumber daya
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat berhasil jika mampu memanfaatkan sumber daya dan memiliki sumber daya yang berkualitas.
- 3) Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi in-formal yang akan terlibat pengimplemantasian kebijakan publik.
- 4) Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
- 5) Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komuniaksi merupakan mekanisme atau syarat utama dalam menentukan keberhasilan kebijak. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan ekonomi, sosial, politik. Kondisi tersebut mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Model George C. Edward III 1980 (Deddy Mulyadi,2018:68) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Adapun penjelasan dari ke empat variabel tersebut diantaranya:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan atau sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.

d) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang dari setiap organisasi adalah adanya SOP (*standard operating procedures*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

c. Model Daniel H. Mazman dan Paul. A. Sabatier 1983 (Leo Agustino,2016:135)

Model implementasi kebijakan yang lain di tawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *frame*

work of policy implementation analysis. Kedua ahli kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan formal dalam keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan dalam tiga teori besar yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap.
- 2) Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki.
- 3) Kemampuan kebijakan menstrukturisasi proses implementasi secara tepat.

d. Model Charles O. Jones (Leo Agustino, 2016:133) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat ada tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan diantaranya:

- 1) Organisasi: Pembentukan atau penataan sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- 2) Interpretasi: menafsikan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat sehingga dapat diterima dan sekaligus dilaksanakan.
- 3) Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan suatu proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

b. Tahapan Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan dapat ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Sugandi (2011:89) yaitu:

1) Tahap Interpretasi

Tahap ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang berbentuk undang-undang ataupun perda.

2) Tahap Pengorganisasian

Tahap ini merupakan tahap penentu pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat didefinisikan sebagai lembaga instans, pemerintah, LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksanaan kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahan paham saat pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas standar operasional prosedur (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Kemudian penentuan besaran anggaran biaya atau pembiayaan, sumber pembiayaan diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain (Swasta/Masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Karena peralatan tersebut akan berperan sangat penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksana kebijakan.

3) Tahap Implikasi

Adalah suatu perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Ahli lain Hogwood dan Gunn (Wahab,2008:26) mengemukakan tahap implementasi kebijakan sebagai berikut :

- a. Tahap I terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
 - 2) Menentukan standar pelaksanaan
 - 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- b. Tahap II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
- c. Tahap III merupakan kegiatan-kegiatan:
 - 1) Menentukan jadwal.
 - 2) Melakukan pemantauan.
 - 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran suatu program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil suatu tindakan yang sesuai dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu, dan pelaksanaan. Sedangkan menurut Wahab (2008:64) memberikan pengertian sebagai berikut. “ implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan yang baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadminitrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu bagi masyarakat. Hal ini tidak dapat mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target groups*) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

Implementasi suatu kebijakan akan mencapai sukses dengan apa yang diharapkan apabila memenuhi fakto-faktor implementasi kebijakan. Sesuai dengan pendapat Edward III (Mulyadi,2015:28) untuk implementasi kebijakan

yang berhasil perlu mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis diantaranya :

- a) Komunikasi
- b) Sumber daya
- c) Disposisi
- d) Struktur kebijakan

Penjelasan variabel diatas sebagai berikut.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadinya komunikasi efektif antar pelaksana program dengan kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari suatu program kebijakan dapat disosialisasikan kesetiap kelompok sasaran secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

b. Sumber daya

Menekankan suatu kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia ataupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan yang baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial merupakan kecukupan modal sebuah investasi atas sebuah program suatu kebijakan. Sumber daya keduanya harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan sebab tanpa handalan implementor kebijakan menjadi kurang energy dan berjalan dengan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan suatu kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program atau kebijakan tidaka akan dapat berjalan dengan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan, dalam *guideline* program atau kebijakan. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat yang akan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

d. Struktur kebijakan

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting, yang pertama merupakan mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operational procedures* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang sistematis, tidak berbelit dan mudah untuk dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi, organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari sesuatu yang berbelit-belit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus menjalin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa yang terjadi dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya

dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku terlalu hirarkis dan birokratis.

c. Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi program sendiri memiliki suatu hambatan diantaranya menurut Rondinelli & Cheema (Erwan dan Dyah 2015:90) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumber daya (*resources*)
- d. Karakteristik institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

Dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan sering kali dihadapkan dengan berbagai suatu hambatan yang dapat mengakibatkan kebijakan terhambat atau tidak terlaksana dengan baik. Ada beberapa upaya untuk mengatasi sebuah hambatan pelaksanaan kebijakan. Menurut Rondinelli & Cheema (Erwan dan Dyah, 2015:90) diantaranya yaitu :

- a. Kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antar organisasi.
- c. Sumber daya.
- d. Karakter institusi implementor.

Penjelasan upaya-upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan diatas adalah:

- a. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan sangat menentukan pelaksanaan kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, maka harus dilihat kondisi lingkungan setiap wilayahnya dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi,

politik, karena kebijakan yang baik dan berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan jika kondisi lingkungan kurang kondusif.

b. Hubungan antar organisasi

Menjalin sebuah kerja sama dengan pihak lain demi tercapainya pelaksanaan kebijakan dengan baik. Menciptakan sebuah koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran atau dengan pihak yang berkerja sama, seperti persamaan persepsi tentang tujuan kebijakan atau program, miliki sarana komunikasi yang baik dan memadai serta persamaan kepentingan.

c. Sumber daya

Sebuah pelaksanaan implementasi kebijakan atau sebuah program tergantung pada aktor lain, sebuah fakta yang menunjukan bahwa prasyarat bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adanya dukungan dari sumber daya yang dibutuhkan, dan sumber daya tersebut memadai untuk melaksanakan kebijakan atau program yang akan diimplementasikan. Baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya finansial (SDF), teknologi, politik, dan informasi yang berkualitas.

d. Karakteristik institusi implementor

Didalam sebuah pelaksanaan kebijakan agar mencapai keberhasilan yang maksimal, harus mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik institusi yang mencakup struktur birokrasi, dan norma-norma yang berada didalamnya. Semua akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program, respon implementor terhadap kebijakan yang terkait, dengan kemauan

implementor untuk melaksanakan kebijakan publik dan pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan serta yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

d. Alokasi dan Harga Eceran Tertingg (HET) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup karenanya kecukupan pangan bagi setiap waktu merupakan hak asasi yang layak dipenuhi, Indonesia merupakan penduduk yang besar disetiap wilayah dan disetiap wilayah penduduk Indonesia masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 Pasal (1) ayat 3 petani merupakan pekerjaan yang dimiliki oleh perseorangan atau berserta keluarganya untuk melakukan usaha tani baik itu dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Para petani biasanya memiliki sebuah kelompok disetiap wilayah. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 Pasal (1) ayat 4 kelompok tani merupakan kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 pasal (1) ayat 1 menjelaskan tentang Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 Pasal (1) ayat 9 dan ayat 10 kartu tani merupakan kartu yang dikeluarkan

oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *electronic data capture* (EDC), EDC itu sendiri adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukan atau menggesek kartu tani dipengecer resmi. Dan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 pasal (1) ayat 8 harga eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu dipenyialur Lini IV. Mengenai kartu tani, penggunaan kartu tani pun ditegaskan dalam pasal (17) ayat 2 di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2020, implementasi kartu tani sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap para petani sesuai dengan UU Nomor.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Meski begitu dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani ini para petani masih belum mendaftarkan diri atau tidak terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani e-RDKK pasal (1) ayat 5.

Landasan Dasar Hukum mengenai kartu tani UU Nomor.19 Tahun 2013, permentan pasal(17) ayat 2 Nomor.10 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian secara rinci landasan dasar hukum mengenai program kartu tani adalah:

- a. UU Nomor.19 ayat 1 Tahun 2013 menetapkan “ perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana prasarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”.

- b. Permentan Nomor.1 Tahun 2020 Pasal(1) ayat 9, Peraturan Menteri Pertanian Nomor.10 Tahun 2020 pasal (17) ayat 2 ,dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 15/M- Dag/Per/4/2013

e. Tujuan dan Maksud Program Kartu Tani

Tujuan dari program kartu tani bagi masyarakat penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran berlandaskan enam tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Sedangkan maksud dari program kartu tani ini agar terwujudnya pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerimanya.

f. Syarat Program Untuk Membuat Kartu Tani

Syarat untuk membuat kartu tani menurut Diki selaku Kasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mengatakan ada beberapa bagian syarat untuk mendaftar atau membuat kartu tani yaitu :

- a. Para petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani.
- b. Mengisi formulir yang disediakan dikelompok tani
- c. Harus terdaftar di e-RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) dalam sistem elektronik

g. Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Kartu Tani

Menurut Diki selaku Kasi Pupuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adanya beberapa peluang dan manfaat bagi masyarakat dalam program kartu tani diantaranya :

- a. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang mengeluh atas harga pupuk yang tidak stabil, hal tersebut dapat menjadi peluang dalam program kartu tani terdapat HET atau Harga Eceran Tertinggi mengenai pupuk tidak akan berubah dan sudah bersubsidi.
- b. Adanya program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, memiliki kemudahan pada penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara).
- c. Kemudahan dalam transaksi pembayaran hasil panen kepada para petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.

Selain peluang terdapat juga sebuah hambatan dalam pelaksanaan program kartu tani diantaranya:

- a. Belum adanya kesiapan pada kios pupuk yang akan melayani kartu tani terkait dengan perangkat yang akan digunakan, mengingat kartu tani cara menggunakannya dengan digesek seperti ATM untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut
- b. Adanya kurang pahaman dalam mengoperasikan kartu tani sehingga banyak kartu tani yang terblokir oleh pihak bank, disebabkan oleh kesalahan dalam memasukan pin.

- c. Keterbatasan Sumber daya manusia yang berkualitas untuk melakukan penyuluhan kepada para petani harus segera disikapi dengan bimbingan teknis atau pelatihan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan program kartu tani adalah kartu yang dibuat guna untuk melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi yang berada di setiap kecamatan masing-masing. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan usaha para petani dan mensejahterakan para petani.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dasar berupa teori-teori atau acuan-acuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu pendukung menurut perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan yaitu terkait dengan variabel implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian langkah kajian beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal melalui internet.

Bedasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penelitian Ni Ketut Sriwinarti (2016) dari jurnal Politehnik dengan judul Implementasi Penggunaan Kartu Petani : Sebagai Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukan

pengendalian distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan.

Selanjutnya penelitian Doni Januansyah (2019) dari Universitas Negeri Sultan Thaha Saepudin Jambi dengan judul Implementasi Pembinaan Kelompok Tani di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian No.82/OT.140/8/2013. Hasil dari penelitiannya yaitu kurangnya pemahaman dari para petani dan kurangnya petugas penyuluh lapangan (PPL) dan kondisi lahan yang berbeda, tidak akuratnya luas lahan kelompok dengan laporan data SIMLUTAN dan Teknologi masih kurang berkembang.

Selain itu penelitian dari Heriza Febriani (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini yaitu Program BUMDES belum optimal, belum adanya BUMDES di desa jatimulya, dan kekurangan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan BUMDES serta perlu adanya bimbingan atau pelatihan bagi sumber daya manusia untuk menggali segala potensi.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan banyak permasalahan atau faktor eksternal atau faktor internal yang menghambat keberhasilan suatu kebijakan atau program. Secara khusus, penelitian melakukan intervensi terhadap sub variabel dan komponen-komponen yang terdapat dalam variabel implementasi kebijakan. Sub-sub variabel implementasi kebijakan ini sekaligus menjadikan acuan dalam membuat

instrumen yang diturunkan kedalam butir-butir pernyataan untuk disebarakan kepada responden.

Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam tabel yang disusun Berdasarkan dari penelitian yang terdahulu hingga yang terkini untuk memudahkan pemahaman pada bagian ini dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Penggunaan Kartu Petani : Sebagai Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Oleh Ni Ketut Sriwinarti (2016)		1. Metode penelitian kualitatif 2. Kajian penelitian sama mengenai program Kartu Tani/Kartu Petani	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian	Menunjukkan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan.
2.	Implementasi Pembinaan Kelompok Tani di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian No.82/OT.140/8/2013. Oleh Doni Januansyah (2019)		1. Metode penelitian kualitatif 2. Sama mengkaji implementasi	1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 3. Program yang dikaji	Kurangnya pemahaman dari para petani dan kurangnya petugas penyuluh lapangan (PPL) dan kondisi lahan yang berbeda, tidak akuratnya luas lahan kelompok dengan laporan

				data SIMLUTAN dan Teknologi masih kurang berkembang.
3.	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Oleh Heriza Febriani (2020)	1. Metode penelitian kualitatif 2. Sama mengkaji implementasi	1. Lokus penelitian 2. Tahun penelitian 3. Program yang dikaji	Program BUMDES belum optimal, belum adanya BUMDES di desa jatimulya, dan kekurangan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan BUMDES serta perlu adanya bimbingan atau pelatihan bagi sumber daya manusia untuk menggali segala potensi.

Dari beberapa contoh penelitian ditabel diatas, maka dapat digambarkan ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaan dalam penelitian sebelumnya adalah salah satu variabel yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan, yaitu implementasi kebijakan, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada kaitan pembahasan itu sendiri. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tentunya membawa konsekuensi pada

hasil penelitian yang diperoleh. Bila hasil penelitian sebelumnya ditunjukkan untuk memperoleh gambaran/deskriptif itu sendiri (variabel implementasi kebijakan) beserta dengan indikator-indikatornya dilingkup organisasi pemerintahan, maka penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani.

D. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan sebuah gambaran mengenai alur peneliti sebagai kelanjutan dari kajian pustaka atau tinjauan teori yang memberikan penjelasan kepada pembaca.

Dari berbagai masalah yang ada di Indonesia salah satunya di sektor pertanian yang kian merosot, kini pemerintah sedang gencarnya mengatasi permasalahan ini salah satunya dengan di keluarkannya program Kartu Tani. Kartu Tani ini merupakan kartu yang dikeluarkan oleh perbankan untuk digunakan dalam transaksi pennebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi. Kartu tani ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani oleh karena itu kartu tani ini untuk meluncurkan, supaya tepat penyaluran pupuk bersubsidi dan tepat harga.

Program kartu tani sebenarnya sudah dilaksanakan pendataan sejak tahun 2017 di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang hanya saja program ini belum berjalan dengan baik dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya salah satunya hambatan dilapangan Kabupaten Sumedang banyak petani yang

kurang paham dengan program kartu tani sehingga tidak dapat menggunakannya dengan baik dan banyak kartu tani yang terblokir oleh bank disebabkan oleh salah memasukan pin saat mengoprasikannya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian khususnya pada sektor pertanian, mengoptimalkan program ini supaya berjalan secara baik dan efektif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang.

Maka dengan ini penelitian untuk meneliti program kartu tani ini menggunakan model implmentasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino,2016:133) yaitu :

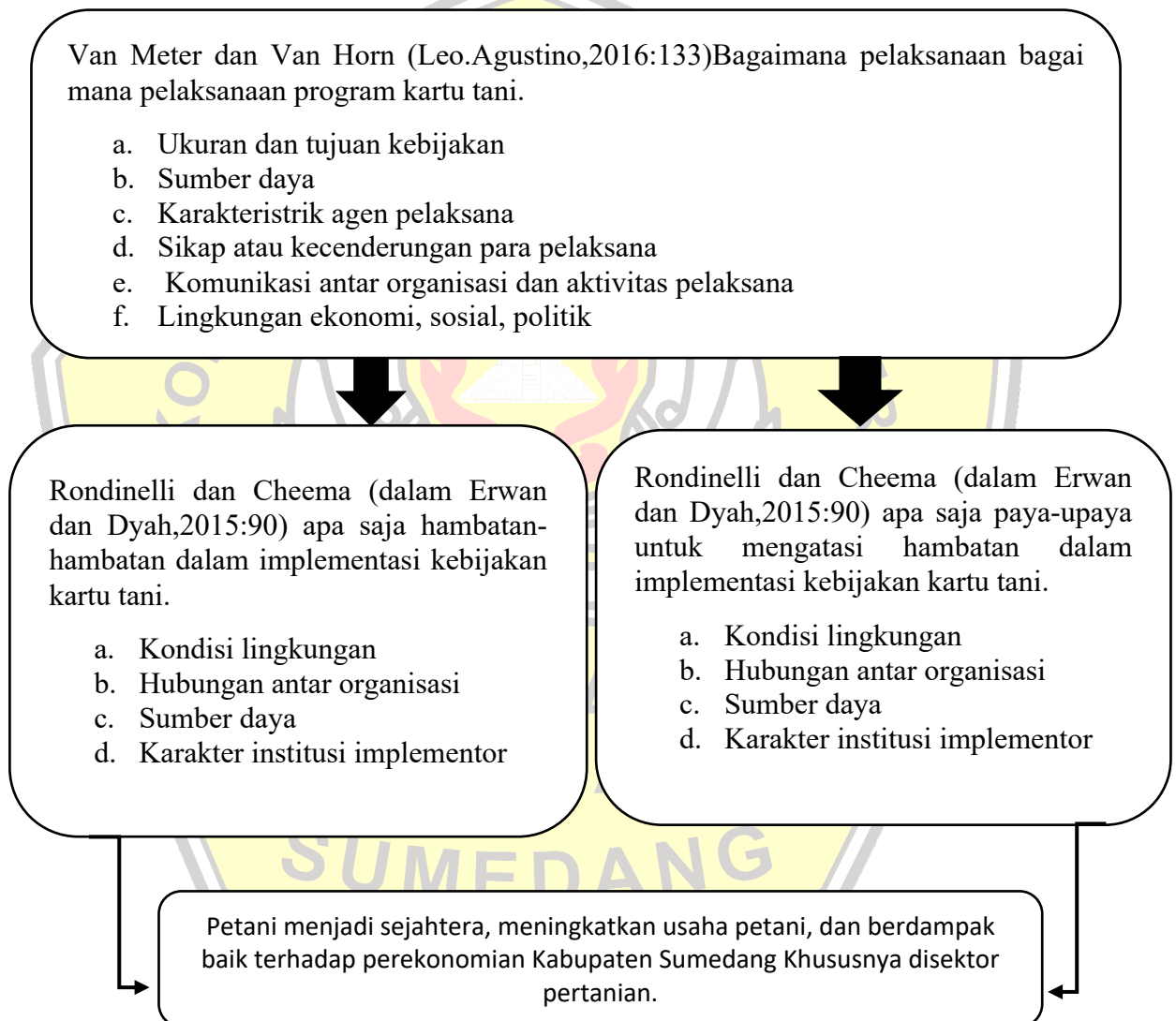
- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap atau Kecenderungan Agen Pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Selain itu dalam implementasi kebijakan ini memiliki faktor penghambat keberhasilan kebijakan, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Erwan dan Dyah,2015:90) diantaranya:

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya
- d. Karakteristik institusi implementor

Dapat dilihat dari permasalahan hingga upaya untuk mengatasi permasalahan implementasi kebijakan program kartu tani ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.dan diharapkan program ini berjalan dengan baik dan penyaluran pupuk bersubsidi ini tepat sasaran

berlandaskan dengan enam tepat yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, dan tepat harga. Selain itu semoga program kartu tani ini berdampak baik bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani khususnya di Kabupaten sumedang. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, peneliti menggambarkan kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian 2021

2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Indikator	Item
Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Leo Agustino,2016:133)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Kemampuan pelaksana kebijakan	1
		2. Kemampuan masyarakat	2
	2. Sumber Daya	1. Sarana dan Prasarana	3
		2. Sumber daya manusia	4
		3. Sumber daya finansial	5
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	1. Adanya standar operasional prosedur(SOP)	6
		2. keseimbangan cakupan luas wilayah dengan jumlah agen pelaksana	7
	4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana	1. Respon agen pelaksana dan masyarakat	8
	5. Komunikasi Antar Organisasi dan Para Pelaksana	1. Adanya koordinasi	9
		2. Adanya monitoring aktivitas kegiatan	10

	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	1. Pengaruh kondisi ekonomi, sosial, politik	11
Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Menurut Rondinelli dan Cheema dikutip oleh (Erwan dan Dyah,2015:90)	1. Kondisi Lingkungan	1. komunikasi pelaksana dengan masyarakat	12
		2. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik	13
	2. Hubungan Antar Organisasi	1. Kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana dengan masyarakat	14
		2. Kurang intensitas pemberian informasi kepada masyarakat	15
		3. Ketepatan dalam penyampaian tujuan kebijakan kepada masyarakat	16
	3. Sumber Daya	1. Kurangnya dukungan Sumber daya manusia yang berkualitas	17
		2. Kurang dukungan sumber daya finansial	18
		3. Kurangnya sumberdaya informasi dan sebagainya	19
	4. Karakteristik Institusi Implementor	1. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat	20

		2. Kurangnya pemahaman implementor	21
Upaya-upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Menurut Rondinelli dan Cheema dikutip oleh (Erwan dan Dyah,2015:90)	1. Kondisi Lingkungan	1. Memiliki komunikasi yang baik antar pelaksana dengan masyarakat	22
		2. kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik yang kondusif	23
	2. Hubungan Antar Organisasi	1. Terjalinya koordinasi pihak yang terlibat dengan masyarakat	24
		2. Intensitas informasi kepada masyarakat terpenuhi	25
		3. Ketepatan dalam penyampaian tujuan kebijakan kepada masyarakat	26
	3. Sumber Daya	1. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas	27
		2. Dukungan sumber daya finansial	28

	4. Karakteristik Institusi Implementor	1. Mempunyai standar operasional prosedur 2. Memiliki kejelasan pada struktur birokrasi	29 30
--	--	--	--------------



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode positivistik karena berlandaskan filsafat positivisme, metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Menurut McMillan dan Schumacker (dalam Siyoto, 2015:28) mengatakan sebagai berikut.

“Metode kualitatif adalah sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016:9) pengertian metode kualitatif sebagai berikut.

“Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam sugiyono,2005:9) secara umum penelitian kualitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci
- 2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berkupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
- 3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*
- 4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
- 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)

Postpositivisme Menurut Salim (Tabrani,2015:64) menjelaskan sebagai berikut.

“Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologi aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal, yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia(peneliti)”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka peneliti kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Desain penelitian ini yang diamati adalah implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020

mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh sugiyono (2016:205) yaitu bahwa:

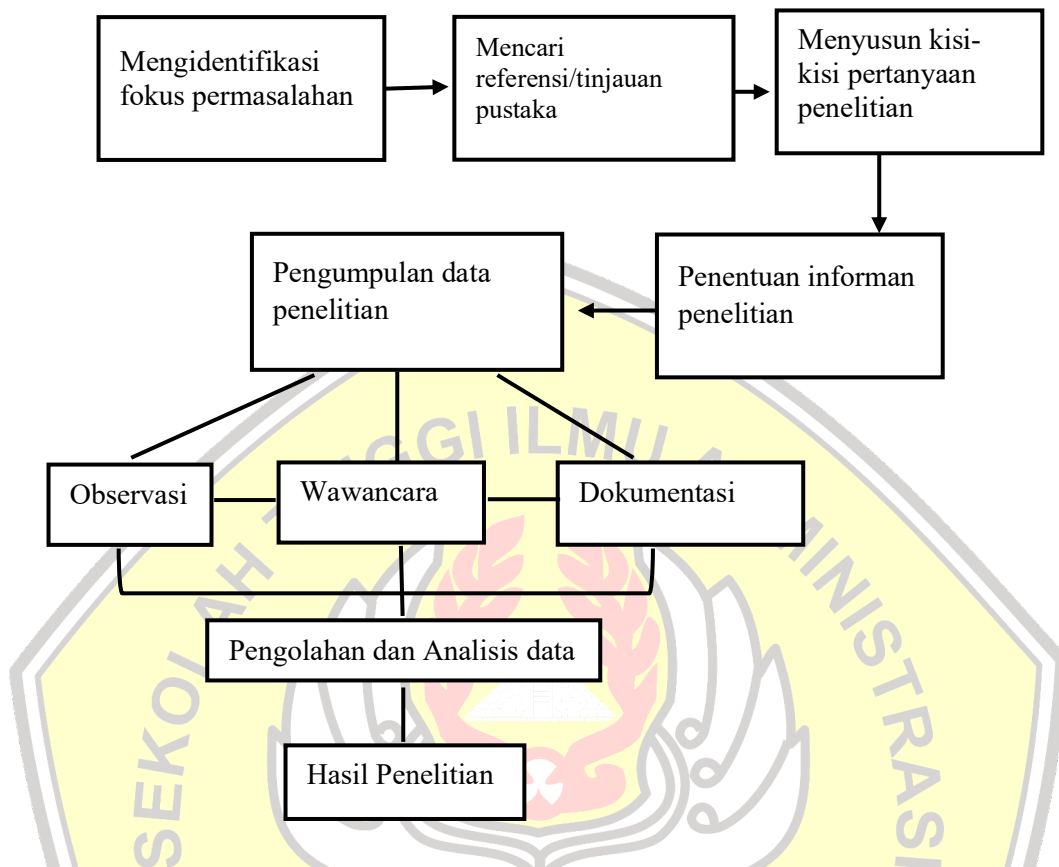
“Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap dan lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru dan lebih ‘trendy’, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabanya dengan metode kualitatif”.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Selain itu juga menurut moleong (2011:8-13) terdapat ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut.

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (*instrument*)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dari dasar (*grounded theory*)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adnya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan desain penelitian dibawah ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 3.1
Desain Penelitian

Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian 2021

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Dalam melaksanakan penelitian setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi, Spradey yang dikutip oleh sugiyono (2016:48) dinamakan “*social situation*” atau

situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu “tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Objek dan Informasi penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang berjumlah 238 orang sudah termasuk petugas penyuluh lapangan.

2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Sampling Purposive*, menurut Sugiyono (2016:9) adalah: “*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Dengan demikian, penelitian ini yang jadikan sumber data adalah mereka yang ada hubunganya dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Otoritas yang dimiliki oleh informan terutama yang berkaitan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

No.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani.

2. Dianggap memiliki informasi yang banyak terutama mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani.
3. Memiliki keterkaitan, baik individu maupun kelompok organisasi tersebut, terutama keterkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Sekertaris Dinas	1
2.	Kasi Alat mesin,Pupuk dan Pestisida	1
3.	Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	2
Jumlah		4

Sumber: Penelitian 2021

Untuk melengkapi data informan, peneliti mendeskripsikan juga data usia dan jenjang pendidikan informan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Deskripsi Informan

NO	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Usia
1	Sekertaris Dinas	Sarjana Pertanian	57
2	Kasi Alat mesin,Pupuk dan Pestisida	Sarjana Pertanian	41
3	Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	Sarjana Pertanian	52

4	Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	Sarjana Sains Terapan	51
---	---------------------------------	-----------------------	----

Sumber: Penelitian 2021

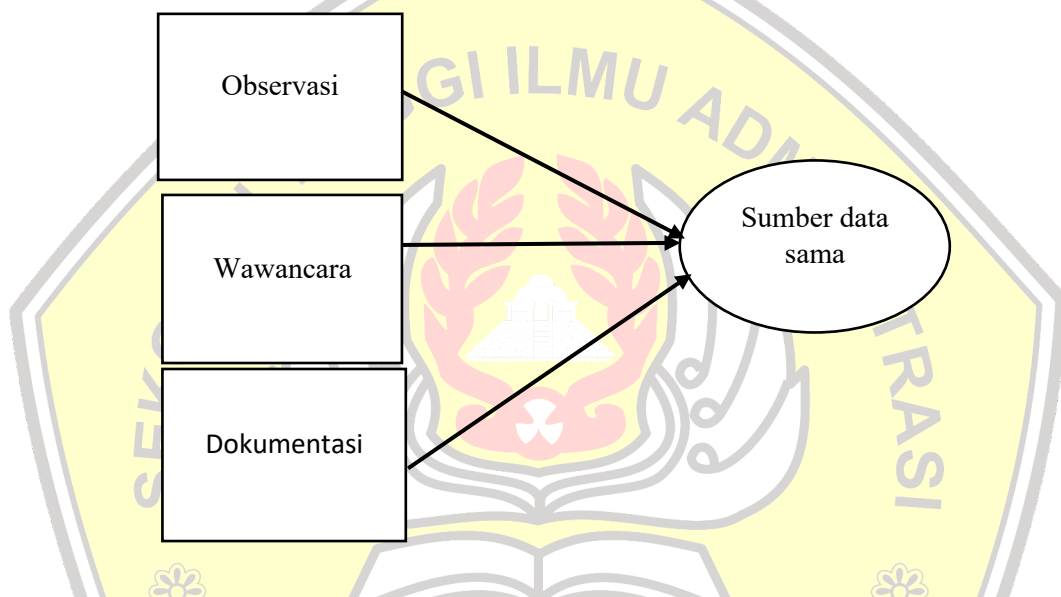
Dengan demikian, penetapan terhadap 4 orang informan tersebut bisa dikatakan layak, tepat dan kapabel mengingat yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan tiap pegawai baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya khususnya yang berhubungan dengan program kartu tani.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang metode yang digunakan dalam memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, laporan-laporan, arsip serta dokumen tertulis, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang dalam pencarian data.
2. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dilapangan sebagai berikut.
 - a) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut dalam proses bekerja.
 - b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan mendalam sesuai dengan arah pedoman wawancara.

- c) Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa rekaman hasil wawancara, photo-photo, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
- d) Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan menggunakan tiga point yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Gambar 3.2 Triangulasi “teknik” Pengumpulan data

Sumber: Sugiono, 2018

D. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis data

Untuk mengolah data dari hasil wawancara dan hasil observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh kepada teknik analisis data mengutip dari Model Miles dan Huberman (2014:12) yaitu sebagai berikut.

1) *Data reduction* (Reduksi data)

Data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

2) *Data display* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

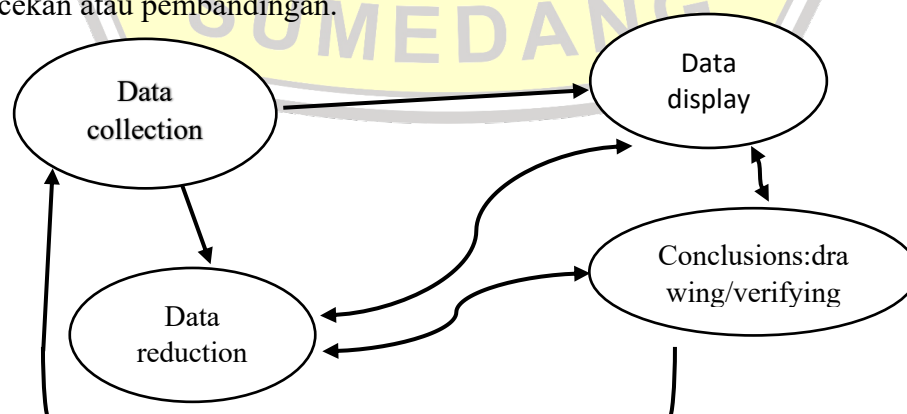
3) *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan merupakan penemuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari sebelumnya yang masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

4) Triangulasi

Merupakan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau pembandingan.



Gambar 3.3 Komponen Analisis data

Sumber: Sugiyono (2018:247)

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dengan jadwal penelitian sebagai berikut.



	S	E	B	E	L	A	S	A	P	R	I		
	S	U	M	E	D	A	N	G					

No	KEGIATAN	Oktober				November				Desember				Januari				Febuari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Tahap Persiapan																																								
	Study Kepustakaan																																								
	Observasi Awal																																								
	Pengajuan Judul																																								
	Pembuatan Proposal																																								
	Seminar Proposal																																								
2	Tahap Penyusunan																																								

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan maka menyimpulkan akhir tentang Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan dengan baik dan masih dalam tahap pengembangan kebijakan. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu sebagai berikut.
 - a. Sumber daya kurang baik hal ini disebabkan oleh kurangnya dorongan dari sumber daya finansial baik dari pihak bank yang ikut serta membantu memberikan dorongan finansial maupun pemerintah pusat.

- b. Karakteristik agen pelaksana kurang baik hal ini disebabkan oleh kurang seimbang cakupan luas wilayah dengan jumlah agen pelaksana yang kurang sesuai.
 - c. Sikap atau kecenderungan para pelaksana kurang baik hal ini disebabkan oleh respon dari masyarakat yang kurang baik merasa ribet.
2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut.
- a. Adanya kepemilikan tanah guntai sehingga menyulitkan untuk melakukan sosialisasi dengan para petani.
 - b. Kurangnya pemahaman para petani disebabkan rentang usia yang sudah tidak mudah lagi sehingga sulit memahami informasi yang diberikan oleh para petugas penyuluh mengenai kebijakan tersebut.
 - c. Kurangnya dorongan dari sumber daya manusia dan finansial
 - d. Kurangnya pemahaman implementor yang mengakibatkan terganggunya kinerja dari implementasi kebijakan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut.
- a. Kondisi lingkungan. Upaya untuk mengatasi permasalahan kondisi lingkungan menjalin komunikasi yang baik antar pelaksana dengan masyarakat, serta pemilik kios harus memiliki stok pupuk yang lebih agar kondisi lingkungan kondusif.

- b. Hubungan antar organisasi. upaya untuk mengatasi permasalahan hubungan antar pelaksana dengan masyarakat yaitu dengan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua pendekatan kepada masyarakat yaitu melalui zoom meeting dan tatap muka dengan dibatasi jumlah masyarakat, serta penyuluh juga melakukan pendekatan sosialisasi perindividu supaya masyarakat dapat memahami dengan jelas.
- c. Sumber daya. upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut harus ditingkatkan kembali kemampuannya dengan melakukan bimbingan teknis bagi para penyuluh sekaligus masyarakatnya.
- d. Karakteristik implementor . upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya struktur birokrasi dan SOP yang jelas dan mudah dipahami dapat mengatasi permasalahan terhadap kinerja implementasi kebijakan tersebut.

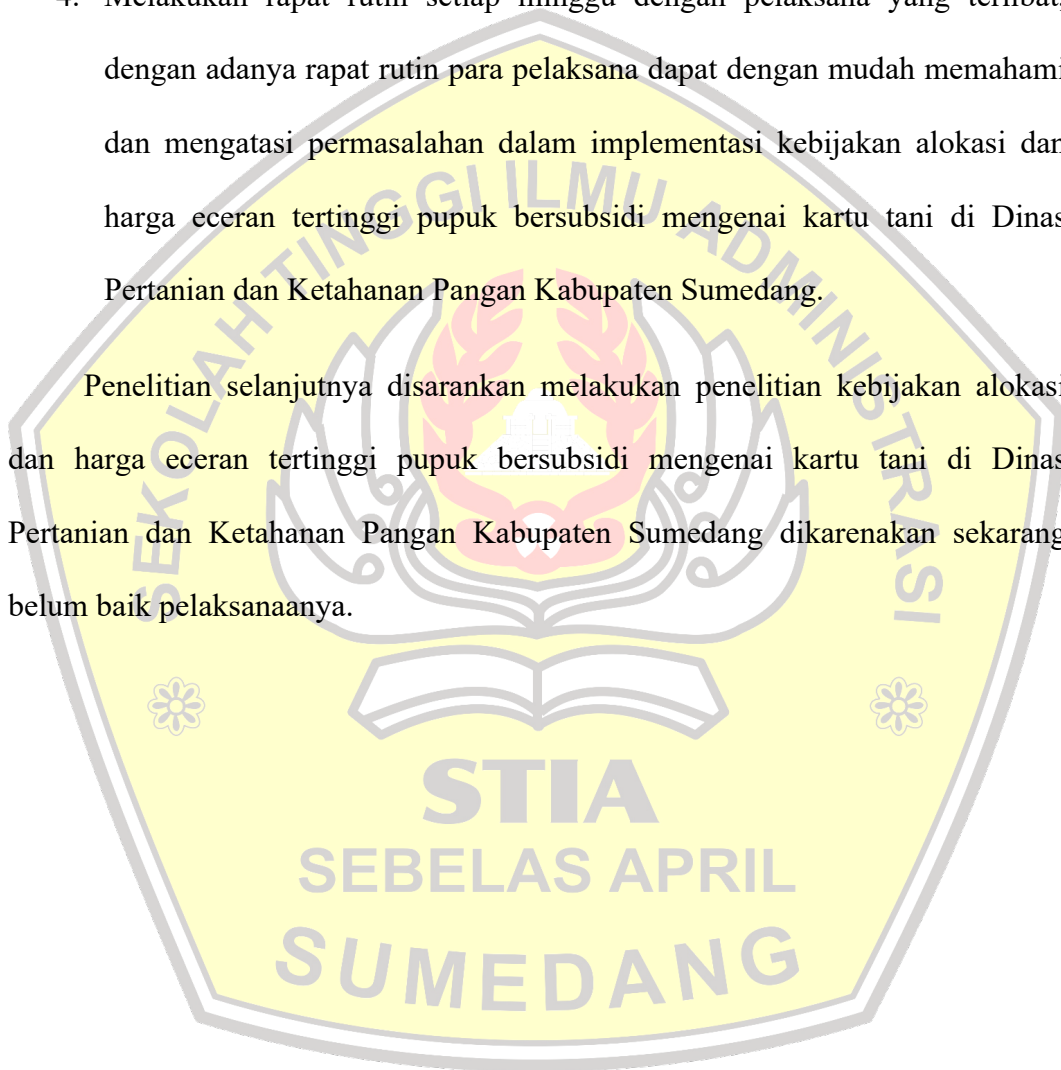
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu

1. Diadakannya kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis bagi para petugas penyuluh dan masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat dan menjadi pendorong implementasi kebijakan tersebut.
2. Meningkatkan dan memperkuat hubungan komunikasi antar pelaksana yang terlibat dengan masyarakat hal ini dapat dicapai dengan upaya-upaya tersebut.

3. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tiap kecamatan pada saat melakukan sosialisasi tentang kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
4. Melakukan rapat rutin setiap minggu dengan pelaksana yang terlibat, dengan adanya rapat rutin para pelaksana dapat dengan mudah memahami dan mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dikarenakan sekarang belum baik pelaksanaanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoelloh. & Yudi Rusfiana 2016. *Teori Analisis Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Doni Januansyah. 2019. *Implementasi Pembinaan Kelompok Tani di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saepudin. [Online], Tersedia: <http://www.google.co.id.html> [Oktober 2019].
- Dodi Yudiardi, Aceng Ulumudin. Dodi Hermana. (2019). *Kebijakan Publik*. Garut : Universitas Garut.
- Haedar, A. A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Prespektif, Model dan Kriteria Pengukuranya. *Jurnal Baca, Volume 1*.
- Heriza Febriani. 2020. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Skripsi*. Sumedang: Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara ada
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Maksudi, B. Iriawan. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Mardalena, S. d. (2017). *PENGANTAR MANAJEMEN*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan proses Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PNM.
- Nicholas Henry. 1988. *Administrasi Negara Dan Masalah Kenegaraan / Terjemahan Luciana D.Lontoh*. Jakarta : Rajawali
- Purwanto, Erwan A dan Sulistyastuti Dyah R. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rifa'i, C. W. (2016). *DASAR-DASAR Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Rusfiana, Abdoelloh. d. (2016). *Teori dan Analisi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Safaria, A. Friday, Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92-100. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/74>
- Sahya.Anggara. (2012). *ILMU ADMINISTRASI NEGARA*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siyoto.s, Sodik. (2015). *DASAR METODOLOGI*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sriwinarti, N. K. (2016). Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali. *Prosiding SENTIA 2016 – Politeknik Negeri Malang*, 191-195.
- STIA Sebelas April Sumedang.2019. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik,Konsep,Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publk (Konsep dan Perkembangannya Ilmu di Indonesia)*. Bandung : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung. CV. Alfabeta

Tabrani.ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taufiqurakhman. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Intermedia* :Jakarta

Dokumen-dokumen

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penyediaan, dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020.
4. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020
5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Sumber Lain

[Online], Tersedia: Kabartani.com. [17 Juni 2017].